



BAB 5

NARASI PEREMPUAN DALAM EKONOMI KREATIF KAIN TENUN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN KOTA KUPANG

Kurniawati Hastuti Dewi

A. Pendahuluan

Bab terdahulu dalam buku ini telah menyajikan analisis kebijakan pengelolaan ekonomi kreatif kain tenun dengan perspektif gender di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan menggunakan *Moser Gender Planning Framework* (MGP), bab terdahulu menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Kupang serta masyarakat setempat untuk mengangkat dan mengembangkan kain tenun sebagai ekonomi kreatif bagian daya tarik wisata lebih kuat dibandingkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Di Kabupaten Lombok Timur, kain tenun belum diletakkan sebagai bagian daya tarik wisata lokal yang diunggulkan dan lebih menitikberatkan pada pengembangan pariwisata alam. Meskipun demikian, sebenarnya

©2023 K. H. Dewi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *E-mail*: kurniawati.hastuti.dewi@brin.go.id

Dewi, K. H. (2023). Narasi perempuan dalam ekonomi kreatif kain tenun di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Kupang. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (119–150). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c673 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

kedua pemerintah daerah baik di Kota Kupang dan Kabupaten Lombok Timur sama-sama belum memiliki peraturan daerah yang khusus mendorong pengembangan ekonomi kreatif kain tenun dengan perspektif gender. Apalagi yang secara khusus melindungi hak-hak perempuan yang terlibat pada pembuatan dan pemasaran kain tenun.

Selain menyajikan analisis mengenai kebijakan berperspektif gender dari kedua pemerintah daerah dalam ekonomi kreatif kain tenun, diperlukan juga analisis yang menyajikan suara dan narasi perempuan yang terlibat dalam pembuatan dan pemasaran kain tenun. Hal ini didasari pemikiran bahwa berbagai kerangka analisis (seperti Harvard, Moser, Longwe) memang berguna menemukan sejauh mana program, kebijakan, atau riset berperspektif gender. Namun, jika tidak berhati-hati dan jeli, suara atau narasi dari para perempuan dalam komunitas yang diteliti justru tertutupi oleh berbagai alat/kerangka analisis yang dipakai. Maka dari itu, bab ini akan menyajikan suara dan narasi para perempuan dalam pembuatan dan pemasaran kain tenun di kedua daerah tersebut karena di balik setiap kain tenun terdapat cerita kehidupan perempuan.

Bab ini ditulis dengan didasarkan pada metodologi riset feminis (*feminist research methodology*) yang berfokus pada pengalaman personal perempuan dalam konteks spesifiknya, untuk memperoleh pengetahuan atas dasar pengalaman nyata kehidupan mereka (Harding, 1987). Penulis percaya pengalaman para perempuan yang terlibat dalam pembuatan dan pemasaran kain tenun sebagai sebuah sumber pengetahuan yang harus dimengerti, dipertimbangkan, dan diperhatikan dalam menyusun kebijakan yang berperspektif gender. Penulis menerjemahkan “narasi” perempuan yang akan dikemukakan dalam bab ini sebagai juga narasi politik dengan “p” kecil yang berarti narasi terkait relasi gender yang sebenarnya merupakan hubungan kekuasaan dalam konteks spesifik kehidupan mereka. Ini untuk membedakannya dengan “Politik” dengan “P” besar yang bermakna dalam perspektif struktur kelembagaan politik formal.

Pendapat penulis dalam mengungkapkan narasi perempuan dalam konteks ekonomi kreatif kain tenun sebagai sebuah relasi gender yang merupakan relasi kekuasaan (*power relations*), didasari oleh dua hal:

pertama, Connell (2008) yang mendefinisikan gender sebagai “*gender relations*” atau “*Gender is, above all, a matter of the social relations within which individuals and groups act*”. Connell (2008) mengatakan *gender relations* atau hubungan gender adalah hubungan sosial dengan individu dan kelompok bertindak berupa hubungan langsung atau interaksi tidak langsung antara perempuan dan laki-laki, atau di antara laki-laki, atau di antara perempuan dalam kehidupan sehari-hari, seputar pengaturan gender dalam kehidupan sosial masyarakat (misalnya dilingkupi oleh struktur sosial agama, politik, kekerabatan, dan budaya). Kedua, posisi penulis juga didasari slogan “*personal is political*”, yaitu slogan gerakan perempuan gelombang kedua akhir tahun 1960-an yang dipopulerkan oleh Carol Hanisch (sebagaimana catatan Eisenstein, 1984). Slogan ini pada intinya hendak menekankan bahwa pengalaman individual atau pribadi sangat terkait dengan struktur sosial dan politik yang lebih luas dalam masyarakat; dan menurut Kate Millet (sebagaimana catatan Eisenstein, 1984) slogan ini dapat dimaknai bahwa hubungan dalam ranah privat antara laki-laki dengan perempuan sebenarnya sangat erat terkait dengan dimensi politik karena di dalam ranah privat itu terjadi juga kontrol laki-laki terhadap perempuan yang kemudian merambah ke ranah yang lebih luas di arena publik. Jadi, ulasan penulis mengenai narasi perempuan dalam ekonomi kreatif kain tenun di Kota Kupang dan Kabupaten Lombok Timur akan erat mengeksplorasi relasi gender antara perempuan dan laki-laki, atau antara sesama perempuan dari kelas sosial yang berbeda, yang semuanya dilingkupi oleh struktur sosial ekonomi, politik, pemerintahan, serta adat istiadat yang melingkupinya.

B. Narasi Perempuan Penenun dalam Konteks Kekinian: Relasi Gender yang Berubah?

Tenun di NTB dan NTT pada mulanya dibuat sebagai bagian penting dalam sebuah upacara adat untuk menjaga tradisi dan kearifan lokal. Pada mulanya menenun bukanlah sebuah kegiatan yang berorientasi ekonomi, tetapi lebih merupakan kegiatan menjaga tradisi dan ritual adat setempat termasuk dalam mengatur relasi perempuan dan laki-

laki. Dalam hal ini, perempuan di NTB maupun di NTT memegang peranan penting dan dominan dalam pekerjaan menenun. Perempuan menenun dan menghasilkan kain tenun untuk berbagai upacara dan ritual adat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perempuan penenun adalah penjaga tradisi. Bahkan dengan berkembangnya kain tenun dengan pewarnaan alami yang ramah lingkungan, para perempuan penenun dapat dikatakan menjadi penjaga kelestarian alam.

Namun, posisi dan makna kain tenun sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kapitalisme, kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan agenda pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu tantangan terkini adalah perkembangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam konteks tantangan terbaru ini, nilai kain tenun mengalami peningkatan tidak sekadar kain tradisional, tetapi menjadi salah satu komoditas unggulan ekonomi kreatif yang dapat bersaing dalam menghadapi MEA.

Dalam konteks tantangan yang baru maka pertanyaan muncul, seperti bila dahulu perempuan penenun ditempatkan sebagai panjaga tradisi dalam sebuah relasi gender konvensional, yaitu posisi dan peran utama perempuan di rumah, sementara laki-laki banyak berperan di luar rumah. Maka dalam konteks kekinian, ketika kain tenun meningkat posisinya sebagai komoditas untuk peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat; apakah relasi gender perempuan dan laki-laki juga mengalami perubahan atau pergeseran? Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan tersebut. Penulis tidak dapat turut melakukan penelitian langsung ke lapangan karena beberapa kendala sehingga sumber utama tulisan ini diperoleh dari transkrip wawancara oleh tim peneliti yang melakukan observasi lapangan. Penggunaan transkrip wawancara telah sepengetahuan para peneliti dan diikuti dengan penyebutan sumber yang jelas dalam pengutipannya. Selain itu juga melalui diskusi dengan anggota tim peneliti dari ASC UGM, narasumber, dan pakar dalam beberapa kesempatan diskusi kelompok terpusat (*Focus Group Discussion/FGD*) di Jakarta dan di Yogyakarta pada tahun 2017.

C. Perempuan Penenun di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pengembangan kain tenun di Lombok Timur didorong ke arah pewarnaan alam sebagaimana dikemukakan AM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Timur (Wawancara dengan AM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017). Selanjutnya, SH dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur menyatakan peran dominan perempuan dalam ekonomi kreatif tenun di daerahnya, sebagaimana dikatakan:

“... tenun ini diproduksi rata-rata oleh perempuan, itu 98 persen perempuan jadi 2 persen-nya laki. Yang laki pun itu bukan tenun yang tradisional, tapi tenun yang ATBM [Alat Tenun Bukan Mesin], sudah berkembang dari yang tradisional ke yang lebih maju. Berikutnya karena ini ditangani perempuan, yang namanya perempuan kan kalau tidak didampingi lemah, tidak punya pekerjaan lemah ya. Harganya juga lebih rendah kalau dia sudah punya kesibukan, industri tenun nilai perempuannya semakin meningkat, semakin dihargai oleh orang lain. Yang berikutnya, tenun ini diharapkan berkembang oleh pemerintah, kita wujudkan pemerintah di dalam pembinaan-pembinaan. Pembinaannya baik pembinaan produksinya secara teknis, pembinaan manajerialnya, kemudian kita bantu juga promosi dan informasi dalam bentuk ikut memasarkan tenun itu keluar dari wilayah Lombok Timur...” (wawancara dengan SH di Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Melalui kutipan wawancara tersebut, jelas bahwa perempuan memiliki peran dominan dalam pembuatan kain tenun. Selain itu, kain tenun juga telah mengalami perubahan dari sekadar kain tradisional menjadi salah satu sumber mata pencaharian perempuan, didorong pemerintah daerah untuk bernilai ekonomi tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara pengembangan kain tenun adalah dengan membuat kawasan khusus percontohan kain tenun, seperti di Desa Pringgasela. MK, salah satu laki-laki yang bergerak

dalam pemasaran kelompok Srikosa di Desa Pringgasela, memberikan ilustrasi mengenai harapan masyarakat yang ingin menjadikan menenun sebagai sarana menopang hidup dan tidak sekadar pekerjaan sampingan saja:

“Memang semua penenun di Pringgasela itu mayoritas penenun dari umur 12 tahun itu sudah mereka bisa menenun, bu. Karena tenun ini termasuk kerajinan turun-temurun, tanpa dibina mulai dari umur 12 tahun mereka sudah bisa menenun. Nah itu awal mula tenun sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan rumah tangga, namun sekarang mayoritas tenun sebagai penopang hidup masyarakat di desa kami, bu. Terutama sekali untuk biaya hidup ibu-ibu rumah tangga selain dari bergaul dan bertani, mereka mengharapkan dari bertenun itu bisa membiayai anak sekolah, membiayai yang lain, dan untuk makan. Mungkin dari masyarakat yang mayoritas masyarakatnya ekonomi lemah, bertahan hidup susah, Bu. Namun, alhamdulillah, tenun bisa dikembangkan di sana. Maka dari itu, kami katakan tenun ini pekerjaan tetap bukan sampingan. Kalau mereka musim panen, cabe, tembakau, dan lainnya, mereka tetap bekerja....” (MK dalam FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017).

Melalui petikan wawancara dengan MK, diketahui bahwa menenun adalah kegiatan yang diajarkan turun-temurun dan lazimnya anak-anak perempuan berumur 12 tahun sudah bisa menenun. Kini berkembang harapan di tengah masyarakat untuk menjadikan menenun yang semula pekerjaan sampingan dan tidak bernilai ekonomi, menjadi sumber mata pencaharian (selain bertani) untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup, seperti di Desa Pringgasela. Di Desa Pringgasela, para ibu rumah tangga berperan besar membuat kain tenun dan menghasilkan berbagai produk turunan, seperti baju, tas, sandal, dan sebagainya. Meskipun tampak baik-baik saja, para perempuan ibu rumah tangga dan penenun ini memiliki dinamika relasi gender yang unik untuk dilihat. Beberapa di antaranya dikemukakan berikut ini. IS salah satu perempuan ibu rumah tangga penenun di Lombok Timur mengungkapkan dinamika kesehariannya.

“*Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum wr. wb.* Kami ibu-ibu perajin di Pringgasela ini rata-rata menenun, dari rumah ke rumah pasti ada alat tenun. Disitu dari pukul 17.00 yang muda, yang tua tetap kita utamakan menenun itu. Dari bangun pagi menyiapkan sarapan dulu. Waktu tidur, anak subuh sudah bangun. Setelah itu beres-beres rumah dulu, buat siapin sarapan, selesai itu tenun kita siapin. Dari situ ada berapa jam setelah sarapan, masuk tenun. Sekitar jam 10.00–11.00, keluar lagi untuk masak makan siang keluarga. Setelah itu salat, masuk lagi menenun. Begitu setiap hari kita lakukan di desa kita. Begitu seterusnya, sampai asar lagi. Keluar dari tenun lagi, salat, istirahat sebentar, kadang-kadang masuk lagi ke tenun. Nah baru malamnya kita istirahat, tapi kadang-kadang ada juga yang masih nenun malam harinya gitu. Apa ya? Dibilang kerjaan samping-sampingan, *full* ga ada istirahatnya maksudnya gitu. Terus-menerus kita kerjakan kan karena pembuatannya cukup lama ya. Satu kain itu butuh waktu dua minggu baru jadi minimal itu ada yang satu bulan, ada yang tiga minggu. Minimalnya dua minggu baru jadi satu kain yang panjangnya empat meter, yang lebarnya kurang lebih 62–65 cm paling lebar. Ya kebanyakan 60 lebarnya. Ya seperti itu kita mengerjakan tenun.” (IS, FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017).

IS menunjukkan bagaimana aktivitas menenun adalah hal yang sudah lazim dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari di rumah. Menenun dilakukan oleh perempuan tua maupun muda. Menenun dilakukan oleh perempuan ibu rumah tangga di sela-sela pekerjaan rumah utamanya, yaitu memasak, menyiapkan sarapan, menyelesaikan berbagai urusan rumah, dan melakukan ibadah wajib salat. Di sela-sela waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk istirahat, para perempuan ibu rumah tangga disibukkan dengan aktivitas menenun yang biasanya dilakukan dari jam 10.00 pagi hingga malam. Oleh karena itu, sebagian besar waktunya habis untuk menenun. IS bahkan menyindir sebagaimana dikemukakan di atas bahwa tidak tepat jika dikatakan menenun adalah pekerjaan “sampingan” karena dikerjakan penuh (*full*) tanpa istirahat.

Tidak begitu berbeda dengan IS, HI, salah satu perempuan penenun, mengemukakan hal yang lebih detail mengenai relasi gender dalam keluarga:

“Asalamualaikum wr. wb. Peran suami saya sangat banyak membantu, ketika saya masuk menenun ya saya meminta bantuannya sedikit. Kan ada prosesnya banyak sekali, ketika dia tidak bekerja dia bantu melinting. Kan kita udah di dalem, pas gesek papannya habis, papan kan yang masukan benang itu. Itu kalau sudah habis pas kita udah duduk, dia kita suruh bantu. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita disuruh buat itu, kita keluar, kopi, buatkan makan, setelah itu kita masuk lagi. Suami bekerja kuli bangunan, serabutan. Kalau pas ada kerjaan dia tidak bantu, kalau pas tidak ada kerjaan dia kita suruh bantu. Mau sih tapi, sama sebenarnya, kalau pas dia lagi butuh mau dibeliin rokok ya kita bantu dia beliin rokok. Sebenarnya pas dia keluar gaji sebulan, kadang dua bulan, apalagi kalau penghasilan tenun tidak mencukupi. Apalagi wajib kita keluarkan 15 ribu per-pagi, itu wajib siang atau malam, paginya belum ngajinya belum. Belum anaknya minta dua atau tiga ribu, kan penghasilan kita satu kain tenun dua minggu itu 400 kalau kita jual, kalau dia laku lagi. Kadang dua minggu kadang satu bulan jadinya, tergantung kita masuk. Kalau kita masuk jam enam pagi, keluar jam 10 pagi bisa itu jadi dua minggu....” (HI, FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017).

HI menunjukkan bagaimana relasi gender antara dirinya dan suaminya. Suaminya seorang kuli bangunan serabutan yang kadang kala membantu sedikit pekerjaannya menenun. Meskipun demikian, HI tetap menjaga relasi gender konvensional yang ketika suaminya memintanya untuk membuatkan kopi ataupun makanan, dia akan berhenti menenun dan melakukan keinginan suaminya. Bahkan, HI juga harus menyediakan kebutuhan suaminya untuk merokok, di samping untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dari penghasilan yang kecil dan tidak menentu dalam penjualan kain tenun, justru HI tidak dapat menikmati apa pun dan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan suami maupun anak-anaknya.

Melalui IS dan HI kini masyarakat setempat mengharapkan menenun bukan lagi sekadar menjaga tradisi dan pekerjaan sampingan, tetapi menjadi mata pencaharian untuk menopang kebutuhan keluarga. Namun sayangnya, meskipun menenun sudah berevolusi dari sekadar pekerjaan tradisional dan sekarang bernilai ekonomi, tidak terjadi perubahan relasi gender di dalam keluarga para perempuan penenun. Perempuan penenun yang juga ibu rumah tangga tetap menjalankan relasi gender konvensional dengan suaminya. Mereka akan memprioritaskan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga yang secara tradisi menjadi tanggung jawab mereka. Mereka akan berhenti menenun jika suaminya meminta mereka memasak, membuat kopi, atau bahkan mencukupi kebutuhan rekreatif suaminya, seperti merokok melalui uang hasil menenun. Padahal bisa saja perempuan penenun dan ibu rumah tangga ini meminta bantuan suaminya melakukan pekerjaan rumah tangga biasa, seperti mencuci, membuat kopi, tanpa merepotkan dan mengganggu pekerjaan istrinya yang menenun untuk menopang kehidupan kerluarga.

Perempuan penenun sekaligus ibu rumah tangga juga menggunakan uang hasil menenun untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dari ilustrasi ini, tampak jelas bahwa sebenarnya para perempuan penenun ini belum mengalami perubahan relasi gender yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki. Bahkan, aktivitas menenun yang sekarang diharapkan menjadi penopang ekonomi keluarga justru membuat perempuan semakin memiliki beban “*triple*” karena dia harus menjadi istri yang melayani kebutuhan suami, ibu rumah tangga yang mengurus berbagai keperluan anak-anak, dan penopang ekonomi kehidupan keluarga melalui menenun.

Menenun sejauh ini belum bisa mengentaskan para perempuan dari kemiskinan mengingat harga jual kain tenun yang sangat murah, tidak sebanding dengan modal dan kerja keras perempuan dalam membuat kain tenun. AT dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) mengatakan para perempuan penenun sering menjual kain dengan harga murah ketika terdesak kebutuhan uang untuk melakukan upacara keagamaan atau ibadah. Harga tenun yang semula Rp450.000,00 dapat dijual dengan harga hanya Rp250.000,00 sampai

Rp300.000,00, padahal seharusnya harganya bisa di atas Rp500.000,00 (AT LPSDM, FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017). TH, ibu rumah tangga dari kelompok tenun Tarum, mengungkapkan hal yang sama bagaimana kain tenun dihargai murah, tidak sebanding dengan kerja keras perempuan penenun.

“... perajin saat sangat-sangat butuh uang dimasukkan (standar harga) ke yang paling rendah gitu. Menunggu yang mahal kan lama, misalnya saat itu butuh uang anak sakit, terpaksa kita jual murah, asal bisa aja pakai beli ini, beli itu. Itu kendalanya kita disana. Menyeragamkan harga disitu masih sulit, belum ada. Mungkin disini kita minta pemerintah bagaimana caranya di situ itu untuk pemasaran. Paling tidak sama *art shop-art shop* yang lainlah diambil dari. Sebenarnya, mereka tau yah bahwa lelah, modal, dana buat barang itu mereka tau, cuma ga ngerti juga kenapa mereka bisa beli dengan harga semurah itu. Kita juga bingung, tapi kadang-kadang kita perajin yang penting ada uang, dapet makan aja. Gitu itu masalahnya di kita ya. Minta solusinya disini bagaimana caranya menangani hal seperti itu untuk ibu-ibu perajin biar tidak seperti itu lagi, tidak lapar, sukses dari tenun-tenunnya gitu.” (TH, FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017).

SH dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga menegaskan bahwa meskipun tenun diharapkan menjadi salah satu sumber kenaikan pendapatan masyarakat dan menjadi pekerjaan utama, harga jual kain tenun dirasakan murah dan tidak sesuai ongkos produksi sehingga belum dapat menyejahterakan masyarakat (Wawancara dengan SH Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Di Lombok Timur, kegiatan menenun ternyata belum diringi dengan perubahan relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga meskipun telah meningkat menjadi sebuah kegiatan ekonomi. Menenun di Lombok Timur jika tidak ditangani dengan baik justru menjebak perempuan ibu rumah tangga ke dalam pusaran beban yang tidak hanya “*double*”, tetapi “*triple*”. Mereka harus menjalankan peran dan tanggung jawab domestik sebagai istri dan ibu yang mengurus

semua urusan rumah tangga, ditambah lagi dengan menenun sebagai penopang kehidupan keluarga. Beban ketiga ini dahulu tidak terjadi ketika menenun masih ditempatkan sebagai sekadar bagian penjaga tradisi. Selain itu, masih murahnya harga kain tenun semakin membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Perempuan ibu rumah tangga dan penenun sulit memperoleh kemandirian finansial, bahkan untuk mengurus keperluan pribadinya. Kain tenun yang dihargai murah hanya cukup dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan suami, anak, dan keperluan ibadah yang tidak ada nilai tambah yang langsung dapat memberdayakan dirinya.

D. Perempuan Penenun di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTT berinisial WR mengatakan bagaimana kain tenun mengalami perubahan posisi dan fungsi, dari semula hanya dipergunakan untuk upacara adat kini dilihat sebagai potensi ekonomi.

“Kalau tenun di NTT itu kita menyebutnya dengan tenun ikat. Banyak yang mengatakan dengan banyak istilah tapi kita sepakat dengan tenun ikat. Sejak dahulu kala orang NTT sudah jadikan menenun ini sebagai pekerjaan untuk mengisi waktu luang, setelah mereka pulang dari kebun, mereka akan buat tenunan, yang pada akhirnya akan mereka pakai untuk pakaian sehari-hari maupun acara-acara penting adat atau keagamaan. Itu kalau dari sisi budaya. Sementara kalau dari sisi pariwisata kami melihat ini dari sisi potensi. Potensi yang tidak main-main karena menurut saya kalau tenun ini kita olah lagi akan menghasilkan nilai tambah yang tidak kecil. Jadi, kalau hasil yang ada banyak yang mengatakan bahwa NTT punya hasil industri rumah tangga. Kalau menurut saya tenun itu belum kita katakan sebagai industri rumah tangga. Kalau industri harus punya komponen. Misalnya ada yang mengurus kapas sendiri, kemudian dari kapas ke benang ada kelompok sendiri, kemudian komponen ini disatukan keluar tenun ikat. Tapi kenyataannya di NTT ini buat

tenun satu orang. Jadi, kita belum bisa sebut ini industri. Jadi, nanti kalau orang pesan dengan jumlah besar, jelas tidak ada. Nah sekarang ini orang sudah memberi waktu khusus untuk membuat tenunan. Itupun mereka masih bikin tenunan sendiri. Jadi, itu ibu-ibu atau nona-nona yang bikin tenunan ya paling cepat satu bulan untuk satu kain.” (Wawancara dengan WR, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 13 Juli 2017).

WR menjelaskan bagaimana kain tenun ikat NTT belum dapat dikategorikan sebagai industri karena semua komponen proses penenunan dilakukan satu orang. Proses produksi kain masih dalam taraf rumah tangga yang dilakukan sebagai sambilan ibu rumah tangga, dengan proses produksi yang lama, dan volume produksi sedikit.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT berinisial SM mengatakan bahwa pemerintah daerah memang berusaha mengembangkan kain tenun NTT dengan ciri khasnya menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat (Wawancara dengan SM, Kadis Nakertrans Provinsi NTT, 13 Juli 2017). SM juga menceritakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia perempuan penenun dengan pelatihan tenun ikat selama satu bulan kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk satu tahun anggaran—terdiri atas 20 orang perempuan penenun di satu kabupaten, sebagai upaya menjawab tantangan MEA—(Wawancara dengan SM, Kadis Nakertrans Provinsi NTT, 13 Juli 2017).

Kepala Bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang berinisial RK mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya, yakni

“...program kami masih berfokus pada pengembangan tenun ikat ini dari usaha kecil menengah sampai bisa menjadi koperasi, karena kebanyakan industri tenun ikat ini masih bersifat tradisional, alat-alatnya masih menggunakan tradisional. Cuma hanya ada 1–2 saja yang sudah menggunakan yang sudah bisa menggunakan atau mengikuti alat-alat modern, tetapi tidak juga yang tradisional itu kalah bersaing justru memang kualitas mereka jauh lebih bagus karena

di kelola oleh tahapan yang tradisional dan mutu nya bisa dijamin lebih bagus. Contohnya kalau merendam pewarnaan itu betul-betul menggunakan pewarna yang alamiah, betul-betul diambil dari getah pohon, akar-akaran itu butuh proses panjang, tetapi hasilnya jauh lebih bagus. Kalau yang modern itu kan sehari bisa jadi beberapa warna, tetapi kualitasnya jauh kalah dari yang tradisional. Itu yang selama ini kami masih mencari solusinya bagaimana sehingga pola tradisional itu masih dipertahankan, tetapi menggunakan alat yang modern sehingga kualitasnya tetap terjamin....” (Wawancara dengan RK, Kepala Bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang, 14 Juli 2017).

Lebih jauh RK menjelaskan terdapat 17 orang pendamping di Kota Kupang untuk mendampingi perajin perorangan maupun lima kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas sepuluh perempuan (Wawancara dengan RK kepala bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang, 14 Juli, 2017). PE dari Dinas Pariwisata Kota Kupang menuturkan bagaimana kebijakan Walikota Kupang ke arah pengembangan kain tenun sebagai bagian pariwisata sudah mulai dilakukan, sebagai bagian pemberdayaan perempuan. “... Karena yang baru ini mereka sudah lebih fokus ke pariwisata. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Memang pemberdayaan perempuan khususnya, kita memang kelihatannya masih punya budaya-budaya konvensional, karena NTT kan masih merasa bahwa perempuan itu di jajaran orang itu dia masih di level kedua. Tapi kan kesini kita sudah semakin maju....” (Wawancara dengan PE dari Dinas Pariwisata Kota Kupang, 14 Juli, 2017). PE kembali menegaskan pentingnya mengangkat kain tenun sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat dengan mengatakan, “Kalau fokus ke ibu-ibu, itu *basic needs*-nya kan hanya untuk mencari sesuap nasi, nah kalau bisa lebih dikembangkan menjadi *main income* akan lebih bagus....” (Wawancara dengan PE dari Dinas Pariwisata Kota Kupang, 14 Juli 2017).

Dari petikan wawancara tersebut, diketahui bahwa pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mengupayakan pengembangan kain tenun NTT menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan

masyarakat. Upaya pemerintah Provinsi NTT dengan melakukan pelatihan perempuan penenun juga diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang untuk mengembangkan tenun ikat ini dari usaha kecil menengah sampai bisa menjadi koperasi, selain melestarikan tenun ikat dengan proses dan pewarnaan alami. Meskipun komitmen Pemerintah Provinsi NTT dan Kota Kupang tampak bagus, ada dinamika yang penting dilihat dalam keseharian perempuan penenun dan ibu rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

Salah satu perempuan penenun di Kota Kupang berinisial SV mengungkapkan serangkain kegiatan sehari-harinya. “Kegiatan saya pagi-pagi itu kalau anak saya sudah pergi sekolah, saya lalu memasak, atau mencuci, atau kasih makan binatang, dan lain-lain. Lepas itu baru saya bisa menenun. Sorenya nanti anak pulang sekolah, mereka kerjakan tugas lalu saya juga kerjakan tugas lagi” (SV penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017). Melalui cerita SV diketahui bahwa menenun dilakukan di sela-sela kegiatan utamanya dalam mengurus anak-anak dan menyelesaikan beragam urusan rumah tangga. Menenun masih menjadi kegiatan sampingan.

Bahwa menenun menjadi kegiatan sampingan juga dikemukakan oleh DB dari kelompok Bugenvil. DB menenun setelah menyelesaikan semua urusan rumah tangga dari pukul 10.00, termasuk hari Sabtu dan Minggu untuk mengisi waktu. DB sulit menenun dalam waktu lama karena memiliki dua anak kecil berumur sembilan dan empat tahun (DB, FGD di Kota Kupang, 15 Juli, 2017). Hal yang sama dikemukakan oleh DL dari Kupang Timur. DL menenun setelah semua pekerjaan rumah selesai dari pukul 10 dan tidak dapat menenun lama karena memiliki dua anak kecil (DL, FGD di Kota Kupang, 15 Juli 2017). Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa menenun masih merupakan pekerjaan sampingan.

Penenun yang lain, SR, mengatakan bagaimana menenun di sela-sela kegiatannya sebagai ibu rumah tangga.

“Pekerjaan saya sehari-hari saya sebagai seorang penenun. Ada suami dan saya punya anak dua. Dan semua ada bagian dalam menenun. Kami punya komitmen dalam berumah tangga, bagaimana harus membangun ekonomi keluarga, karena saya punya prinsip bapak ada uang, saya juga ada uang. Oleh karena itu, saya tekuni tenun ikat ini mulai dari masih sekolah saat usia saya 15 tahun. Dan puji tuhan, dengan adanya pendampingan, dulu dari mulai pewarnaan kimia sudah beralih ke proses pewarnaan alam. Kelompok kami mulai terbentuk tahun 2014 dan bekerja sama dengan ASPPUK dan anggota kelompok kami ada 25 orang dan semuanya penenun. Ketika bergabung dengan yal, banyak hal yang kami dapati. Kalau dulu kami membeli obat kimia dengan sangat mahal. Tapi kalau sekarang kami mulai memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar, kemudian kulit kayu, bahkan bulu kelapa yang mau dibuang kami jadikan pewarnaan alam. Dan pemasaran sudah sampai Eropa, bahkan bulan kemarin ada kunjungan dari Uni Eropa. Kendalanya dalam bentuk pemasaran, karena orang kalau beli kainnya saja mungkin masih kurang, jadi mereka mencari produk yang sudah jadi. Kendalanya hanya itu, bagian pemasaran. Kalau bisa lewat kesempatan ini bagaimana kain-kain ini kita jadikan produk-produk lain” (SR, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Dari cerita SR, diketahui dimensi lain dari menenun bahwa menenun juga dimaksudkan untuk membangun ekonomi keluarga dan membuat dirinya memiliki sumber daya ekonomi sehingga sama dengan suaminya. Cerita yang agak berbeda dari AT penenun yang juga seorang Guru PAUD, sebagaimana dikatakannya:

“Pekerjaan saya sehari-hari sebagai Guru PAUD. Jadi, saya mengelola PAUD. Kegiatan di PAUD ini hanya empat hari dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadi Jumat-Sabtu itu saya kegiatannya menenun. PAUD itu dari jam 8.00 sampai jam 10.00. Setelah pulang dari mengajar, saya lanjut menenun. Karena kita ada pasaran di beberapa toko yang ada di Kota Kupang, jadi kita harus kerjakan untuk membantu ekonomi. Memang suami juga kerja, tapi kita

harus bantu suami untuk biaya anak sekolah” (AT, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui cerita AT, menenun adalah pekerjaan sampingan yang dikerjakan di sela-sela pekerjaan utamanya sebagai pengajar PAUD. AT juga mengatakan bahwa tujuannya menenun adalah untuk membantu ekonomi keluarga, untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Pengalaman lain dikemukakan oleh MA seorang penenun yang mengatakan menenun bukan karena uang.

“Saya penenun, ketertarikan saya menenun bukan karena uang. Tapi karena mau mengungkapkan rasa seni, seni itu kita tuangkan dalam motif-motif kain. Jadi, banyak belajar dari teman lain, kemudian saya merasa bahwa ternyata bisa cari uang dengan cara ini. Kemudian dari tahun 2002, untuk Kabupaten Kupang itu kelompok tenunnya itu beberapa kelompok yang anggotanya 20—30 orang itu penenun. Dalam perjalanannya itu banyak kami dampingi penenun, dan juga ada banyak modifikasi, seperti yang dibilang tadi yang semula menggunakan naptol kita kembali ke celup tradisional. Jadi, kalau kaitannya dengan tenun ikat, memang kalau dulu alasannya modal, kalau sekarang mungkin sudah ada koperasi, kemudian dana ada dana desa, dan sebagainya. Ada kemudahan, tapi bagaimana kita bisa mengakses itu jadi persoalannya. Kita perempuan, jadi kalau kata orang desa itu kita itu tidak bisa, tetapi menurut saya, ada perkembangan baik kalau kita berorganisasi. Untuk itu saya punya saran, nanti kalau tenun ikat ini bisa jadi ikon NTT, memang sekarang orang sudah omong banyak tapi saya kira pasar belum banyak....” (MA, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui cerita AT, diketahui bahwa bagi dirinya menenun tidak hanya sekadar mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi untuk ekspresi seni dan menggarisbawahi pentingnya berorganisasi sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Perempuan penenun yang lainnya, yaitu SL juga mengungkapkan dinamika dan kesulitan dalam menenun dan mengurus anak-anak, seperti yang dikatakan berikut.

“Dalam satu rumah tangga kita ada keluarga, yaitu bapak, anak, mama, jadi malamnya bertemu doa untuk makan bersama di meja makan itu kita punya rencana kerja; anak ke sekolah, bapak ambil dia punya kegiatan sendiri, mama punya kegiatan. Jadi, bangun pagi itu kita musti gumuli itu doakan itu. Jadi, akhirnya *kitong* sebagai mama itu pagi-pagi itu kita yang pertama kali angkat kegiatan, yaitu di tungku, untuk memasak buat anak, buat bapak untuk pergi kerja, menyimpan api, semua itu lalu duduk untuk kerja tenun. Jadi, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini saya sebagai mama harus datang supaya ada pengalaman supaya bisa dibagikan ke kelompok . Mama dari desa lain, menikah dengan orang dari desa lain. Jadi, kita titipkan (anak anaknya) kepada tante-tantanya. Tante-tante dari anggota dari Dasawisma, di kantor desa, di gereja, jadi mama Martha ini memotivasi kita semua dengan kegiatan-kegiatan dalam menghasilkan tenun baru, kain meja, keripik-keripik dari jagung, dari ubi, dari pisang. Jadi, sekarang kelompok ini masuk untuk buat itu. Jadi, kita kalau dalam kelompok kita buat keripik ini, nanti kalau dapat resep baru kemudian kita praktik. Lalu kalau kita bagi ke anggota hasil praktik kita, kira-kira kita satu orang dapat sedikit tapi kita uangkan satu orang lima ribu. Bulan datang kita bawa itu uang kita masukan kas, kalau ada resep lain lagi ya kita bisa buat. Jadi, kemarin kita dua hari ada pembinaan untuk pewarnaan dari ubi daun.” (SV, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui cerita SV, diketahui bahwa menenun dilakukannya setelah dia menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah, seperti memasak dan menyiapkan makanan untuk suami yang pergi kerja. SV juga menggunakan jaringan perempuan, yaitu tante-tante anggota *dasawisma* (adalah bagian program PKK, *dasawisma* merupakan kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10–20 kepala keluarga (KK) dalam satu Rukun Tetangga/RT) untuk membantu menjaga anak-anaknya. Kesulitan dalam menjaga anak-anak sembari menenun juga dikemukakan oleh MA.

“Saya mau cerita. Saya tidak punya anak, tapi ada anak-anak di rumah. Saya mau cerita susahny ada anak di rumah. Ketika sudah menenun, walaupun kita sudah kasih makan tapi pada saat mereka menangis tapi waktu mereka mau gendong dan sebagainya kita mau marah tidak bisa. Apalagi kalau mereka tarik itu alat kita, susah sekali. Jadi, sebagai ibu kita harus prioritaskan, kita mau urus anak atau urus tenun. Karena uang juga butuh, tapi anak juga butuh kita. Misal satu hari kita satu bisa satu satu helai, tapi kalau ada anak kita tidak bisa itu kita dapatkan. Jadi, kita harus prioritaskan kerja atau prioritaskan anak, tidak mungkin dia tidur dan makan sendiri, karena biasanya bapaknya ke kebun dan kita tidak ada pengasuh. Kalau orang punya uang mungkin punya pembantu, tetapi kalau di kampung tidak ada, biasanya tantenya atau neneknya itu yang mau mengasuh kita titip” (MA, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui petikan wawancara tersebut, MA memperlihatkan kesulitannya dalam membagi waktu antara perannya sebagai perempuan penenun dan sebagai ibu dalam mengurus anak-anak, karena suaminya tidak mau membantunya. Apabila anaknya memerlukan perhatiannya, dirinya akan berhenti menenun dan memprioritaskan kebutuhan anaknya.

Selain menenun, ada juga perempuan yang aktif menjadi koordinator kelompok penenun sebagaimana kisah WL berikut ini.

“Saya akan menceritakan aktivitas saya dari senin ketemu lain lagi. Kebetulan saya dipercaya jadi ketua RT di wilayah saya. Kegiatan saya sehari-hari saya sebagai pengusaha, kalau sedang tidak keluar biasanya saya mengurus cucu dan ngurus usaha di rumah kebetulan ada kios dan juga kalau ada pesanan di rumah buat produk, saya buat produk, karena disitu saya bergerak di bidang perikanan untuk buat dendeng sama abon dan steak. Jadi, kalau ada pesanan, di samping jaga kios, kita produksi. Ya begitu kegiatan saya kalau tidak ada aktivitas dalam kelompok, kebetulan dalam kelompok saya dipercaya untuk mengkoordinasi kelompok mawar tersebut. Jadi, yang bisa mengatur waktu ya kita sendiri, bagaimana kita bisa meluangkan

waktu untuk bisa membantu orang banyak. Kadang-kadang kalau saya sedang keluar saya kasian juga itu sama masyarakat kalau mereka sedang butuh. Awalnya agak sulit mengubah pemahaman suami bahwa kita jalan itu bukan jalan sembarangan. Saya jalan untuk membantu orang banyak. Tapi dari hari ke hari akhirnya suami mengerti. Sekarang kalau saya bilang besok saya ada kegiatan disini, suami membolehkan, dan kadang-kadang kalau ada motor yang sedang tidak dipakai dia untuk pergi dia bilang pakai saja. Jadi, harus bisa mengatur waktu. Memang awalnya agak berat, karena kami keluar dari pagi sampai malam baru pulang. Tapi lambat laun suami mungkin memahami 'oh ternyata saya punya istri keluar tidak sembarangan, dia keluar untuk membantu banyak orang' Kalau ada telepon besok ada pertemuan disini, sudah dia tidak berkomentar. Kadang-kadang kalau dia punya waktu dia jemput" (WL, FGD di Kota Kupang, 15 Juli 2017).

Sebenarnya, dalam rantai proses pembuatan kain tenun, laki-laki juga berperan, seperti "Biasanya ada bapak-bapak kalau ada kerja itu membantu menggulung benangnya itu, benangnya kan dibeli terus datang. Nah, itu digulung oleh bapak-bapak. Jadi, dibantu oleh bapak-bapak terutama dalam menggulung" (Wawancara dengan Asisten Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, 14 Juli 2017). Namun, melalui berbagai petikan wawancara dari para penenun dan perempuan yang terlibat dalam pembinaan kelompok penenun, dapat dilihat bahwa menenun masih ditempatkan sebagai kegiatan sampingan di Kota Kupang. Meskipun ada harapan kain tenun menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan keluarga, namun masyarakat khususnya kaum perempuan belum mampu menempatkan kegiatan menenun sebagai kegiatan utama.

Sebenarnya, semakin banyaknya perempuan ibu rumah tangga di Kota Kupang yang menenun untuk memenuhi kebutuhan hidup sejalan dengan perkembangan Kota Kupang. Bapak AM, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang menjelaskan, sekarang di Kota Kupang sudah mulai lazim seorang istri juga bekerja di luar rumah, kecuali istri tidak berpendidikan karena sulit bekerja di sektor formal.

Dengan kebutuhan yang meningkat, para istri juga ikut membantu perekonomian keluarga, termasuk menenun, seperti dia contohkan di Yogyakarta (perempuan membatik) (Wawancara dengan AM, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, 14 Juli 2017).

Meskipun perempuan di Kota Kupang makin banyak menjadikan kegiatan menenun sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga, ini tidak berarti mengubah relasi gender dalam keluarga. Perempuan tetap diharuskan menjalankan peran domestik, seperti memasak, menyiapkan makanan dan menjaga anak-anak, serta menyiapkan keperluan suami. Jadi, kemampuan perempuan untuk menghasilkan sumber daya ekonomi baru dalam keluarga melalui menenun ternyata tidak serta merta mengubah relasi gender. Bahkan, perempuan penenun dengan anak-anak kecil menghadapi lebih banyak kesulitan karena harus merawat anak-anak mereka sembari menjalankan kegiatan menenun. Menariknya, para perempuan penenun ini memanfaatkan jaringan perempuan dari ibu dan tante-tante mereka untuk membantu mereka menjaga anak-anak apabila mereka sibuk menenun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di Jawa, sebagaimana temuan Ratna Saptari. Saptari melakukan penelitian di Desa Kayuwangi Malang dan mencatat penggunaan jaringan kerabat (*kin-based networks*) dan jaringan antarkerabat (*inter-household networks*) untuk menyediakan perawatan anak-anak agar perempuan dapat bekerja sebagai buruh pabrik rokok (Saptari, 2000).

Jadi, tidak jauh berbeda dengan pengalaman perempuan penenun di Lombok Timur, perempuan penenun di Kota Kupang juga justru mengalami beban “*triple*” karena harus tetap menjalankan peran menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga sebagai istri, ibu, dan sekarang ditambah lagi dalam ekonomi kreatif tenun untuk menambah penghasilan keluarga. Meskipun tidak semua penenun berorientasi menenun untuk menambah penghasilan keluarga, terdapat juga beberapa penenun yang melakukannya untuk memenuhi rasa seni.

Sedikit terjadi perubahan dalam relasi gender antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana perempuan yang menjadi pendamping kelompok penenun. Kasus WL memperlihatkan bagaimana aktivitasnya berorganisasi mendampingi perempuan penenun setiap hari pada

awalnya tidak didukung suaminya. Namun, ketika perlahan suaminya paham akan kegiatan dan dampak positifnya, secara perlahan suami WL mendukungnya, bahkan tidak segan mengantarkannya. Pada kasus ini, WL yang bukan penenun, tetapi seorang pengusaha dan mendampingi kelompok perempuan penenun, memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada para perempuan penenun. Para perempuan penenun rata-rata dari keluarga ekonomi lemah yang ingin keluar dari kemiskinan. Sementara itu, WL berasal dari kelas menengah yang berkecukupan.

Dalam konteks ini, menenun bagi para penenun perempuan kelas bawah mungkin belum menjadi sarana perubahan relasi gender. Namun, berkembangnya tenun sebagai salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat ternyata memberikan dampak positif bagi perempuan kelas menengah karena mereka memiliki sumber daya lebih untuk berkembang. Dengan demikian, perlahan para perempuan tersebut memiliki posisi tawar untuk memperbaiki relasi gender dalam keluarga dan berperan luas di masyarakat.

E. Narasi dan Jaringan Perempuan dalam Pemasaran Kain Tenun

Selain narasi perempuan penenun, yang juga penting untuk diperlihatkan adalah narasi dan peran perempuan dalam pemasaran kain tenun di Lombok Timur dan Kota Kupang. Secara khusus penulis ingin memperlihatkan bagaimana narasi perempuan, jaringan, serta peran perempuan dan peran laki-laki dalam pemasaran kain tenun. Narasi dan jaringan perempuan yang akan dibahas pada bagian ini memperlihatkan interaksi antarkelas sosial para perempuan terjadi dalam pemasaran kain tenun. Selain itu, dikemukakan pula peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemasaran kain tenun. PKK (pada awalnya kepanjangan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi untuk perempuan yang disokong dan didirikan rezim Orde Baru pada tahun 1972 sebagai upaya merespons perkembangan era Reformasi. PKK melakukan penyesuaian

dan perubahan nama menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada tahun 2000 (Dewi, 2015, 2023).

Di Kabupaten Lombok Timur, upaya memfasilitasi pemasaran para pengusaha kecil menengah termasuk kain tenun dilakukan dengan wadah Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (FPL). Beberapa kegiatan yang dilakukan FPL dalam memperkenalkan produk kain tenun yang memiliki ciri khas berbeda-beda di tiap kecamatan, misalnya melalui pameran, lomba desain, fesyen, dan acara-acara kelembagaan dengan memanfaatkan skema *corporate social responsibility* (CSR) dari BUMN (Wawancara Kustulasari & Rakhmadhani ASC UGM dengan ST, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Pemasaran kain tenun menjadi salah satu persoalan utama di Lombok Timur karena belum dikelola secara baik dan profesional. Beberapa upaya yang telah dilakukan misalnya meminta para pegawai pemerintah daerah mengenakan baju kain tenun pada hari tertentu, membawa kain tenun ke pameran-pameran nasional dan internasional, seperti difasilitasi ASPPUK (Wawancara dengan ST, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga melakukan promosi kain tenun ke luar Lombok Timur melalui berbagai acara (*event*) dan meminta para pegawai menggunakan kain tenun minimal satu kali dalam seminggu (Wawancara dengan SH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017). SH juga menambahkan bahwa dalam rantai pembuatan kain tenun, bapak-bapak biasanya berperan membeli benang dan alat, sementara pada rantai pemasaran kain tenun, bapak-bapak ikut berperan memasarkannya. Dari pengalamannya selama ini, SH belum pernah menemui perempuan penenun yang dibina dalam kelompok yang dimarahi atau tidak didukung oleh suaminya (Wawancara dengan SH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Menariknya, dalam rantai pemasaran tenun di Lombok Timur terungkap perbedaan pendapatan antara para penenun dan para penjual. Para penjual atau pengepul kain tenun lebih menikmati atau memperoleh keuntungan daripada para perajin atau penenun. Para

pengepul atau penjual biasanya mengambil barang dengan harga murah yang kemudian dijual dengan harga tinggi (Wawancara dengan ST, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, WR Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan hal berikut mengenai pemasaran kain tenun.

“Dengan demikian, kita tidak komersilkan itu dengan bikin kain jual kain. Mendingan kita kalau bikin tenunan itu kita jualnya jas, nanti potongan kecil dari jas itu kita masih bikin souvenir atau produk lain. Kalau itu yang harus kita lakukan di sektor pariwisata ya kita sentuh dengan kebijakan ekonomi kreatif kita, yang kita pada saat ini kita rekatkan itu ke bidang industri. Nah bidang industrilah yang nanti menggerakkan segala upaya dalam rangka mengolah hasil produk budaya berupa tenun ikat ini untuk menjadi satu olahan baru. Jadi, nanti kalau ada orang mengatakan 'kok kain NTT mahal ya?' Ya mahal lah, kan *handicraft*. Itu bikin sendiri, prosesnya lama, dan tidak akan sama dengan kain yang lain. Kemudian kalau kita mau hitung waktu produksinya dan biaya produksinya, kalau kita bilang itu orang yang bikin itu subsidi kepada orang yang beli. Satu bulan itu kalau kita hitung ongkos dia makan saja kalau kita hitung dia makan tiga kali sehari, sebulan itu ada 90x dia makan kalau dengan harga Rp5.000,00 per porsi. Itu sudah berapa saja duitnya? Nah sementara dia menghasilkan produk itu dijualnya kalau di yang mahal itu. Cuma dari daratan Sumba atau dari tenunan tertentu karena dianggap kualitasnya bagus karena jahitannya rapat. Itu yang dikategorikan mahal.” (Wawancara dengan WR, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 13 Juli 2017).

Dari keterangan WR, kain tenun NTT termasuk ekonomi kreatif yang kemudian direkatkan dalam industri. Kain tenun diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan tangan sehingga harga jualnya menjadi tinggi. Jadi, jika ada produksi massal yang mengarah ke industri kreatif adalah pada hasil olahan kain tenunnya.

Di Kota Kupang pemasaran kain tenun diintegrasikan dalam kerangka besar upaya pemerintah Provinsi NTT dalam mempromosikan kain tenun di kabupaten lain, seperti Sumba Timur, Belu, dan Sikka. Beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti melakukan berbagai pameran; menjalin kerja sama dengan METRO TV dengan para presenter memakai kain tenun; memajang kain tenun di toko-toko souvenir di kabupaten/kota termasuk di Kota Kupang dengan berbagai variasi, seperti kain adat, dompet, kain, tas, dan sebagainya sejak tahun 2012 (Wawancara dengan AF, Sekretaris Bappeda Provinsi NTT, 13 Juli 2017). Di Kota Kupang, Bapak AR, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang mengatakan kebijakan daerah untuk memakai kain tenun pada hari Kamis dan Jumat untuk mendorong pemasaran kain tenun (Wawancara dengan AR, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, 14 Juli 2017).

NO dari Dinas Perindustrian Provinsi NTT mengungkapkan perubahan nilai kain tenun yang semula dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan adat menjadi orientasi bisnis. Dalam pemasarannya ke luar negeri, PKK dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan penting.

“Nah, semula tenun ini bukan ke arah bisnis, tapi untuk memenuhi kepentingan adat istiadat, budaya, jadi bukan bisnis. Nah, sekarang bergeser menjadi bisnis, jadi dulu orang bikin tenun ada upacara-upacara adat yang mereka *pake*, sekarang menjadi bisnis. Sekarang tenun NTT sudah masuk ke pasar dunia bahkan. Memang beberapa kali itu provinsi melalui PKK sudah sering dikirim ke luar negeri-luar negeri, ke Belanda sudah, ke Jepang sudah, itu tenun. Dan memang mendapat respons besar. Sehingga ada upaya dari pemerintah Belanda mengembangkan semacam (Wawancara dengan NO dari Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13 Juli 2017).

AF menambahkan adanya upaya ibu-ibu PKK setempat untuk membawa para desainer dari Jakarta untuk mengangkat kain tenun NTT.

“Awalnya dari ibu-ibu PKK. Baik dari Dinas Perindustrian atau Dinas Perdagangan, waktu itu dengan ditetapkannya PI No. 6 (kalau tidak salah, soalnya saya lupa) tentang Kota Industri Kreatif, tapi tidak secepat itu ada Permen yang mengatur atau mungkin ada, tetapi saya lupa. PKK lebih mendahului dengan melakukan pertunjukkan (*show*) ke Jakarta dan melakukan kerja sama. Waktu itu Ibu yang sering menggunakan rancangan itu dan akhirnya ia menggunakan beberapa pameran untuk ekshibisinya dia hampir menggunakan semua pakaian. Untuk *event-event* khusus menggunakan kain tenun asal NTT.” (Wawancara dengan AF, Sekretaris Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13 Juli 2017).

Melalui kutipan wawancara dengan NO dan AF, diketahui bahwa perempuan secara kolektif melalui PKK berperan dalam pemasaran kain tenun. Bahkan PKK juga berperan dalam regenerasi para penenun.

“Ya ini yang disinggung Pemprov kemarin yang bekerja sama dengan Kementerian untuk membangun sekolah tenun, atau semacam prodi. Dulu kan, Menteriya orang NTT, dulu dibangun kan ya sekarang sudah balik soal biaya sehingga dokumen itu tidak sampai final. Dan penenun itu orang di kampung kan ya tidak semua orang sekolah. Orang yang sekolah biasanya tidak menenun, kalau yang sudah kuliah itu kerja. Jadi, kalau yang sudah di rumah tidak sekolah pasti bisa dan saya yakin itu pasti tidak punah.” (Wawancara dengan VE, Dinas Perindustrian Provinsi NTT, 13 Juli 2017).

Perempuan secara individu juga berperan dalam pemasaran kain tenun. YU, perempuan bukan penenun, namun seorang pengusaha keripik dan ibu rumah tangga, mengungkapkan upaya membantu memasarkan kain tenun dengan cara menghubungkan usaha keripik dengan kain tenun. Dalam wawancara dikemukakan beberapa cara yang ditempuhnya, yaitu:

“Saya ibu rumah tangga biasa yang mencoba untuk menjadi luar biasa. Dalam perjuangannya itu, kalau keringat bisa keluar darah dia

keluar darah, kalau air mata bisa keluar darah dia keluar darah. Tapi saya tidak akan membahas lebih mendalam soal itu. Saya hanya akan berbicara yang kaitannya dengan tenun. Saya sama seperti Mama Wid, kita pengamat, mendorong, memotivasi, dan memastikan agar bisa tenunan ini bisa diketahui orang. Saya juga bukan penenun, saya pengusaha keripik. Lalu saya berpikir bagaimana menghubungkan usaha saya dengan tenun. Jadi, saya menggunakan desain tenunan dalam label (keripik) saya. Jadi, produk saya kebetulan saya *konsen* di produk pertanian dan perikanan. Lalu, bagaimana saya membuktikan cinta saya terhadap tenun NTT ini, saya masukkan ke label produk saya. Jadi, meskipun orang lain yang mendesain, saya yang mendesain kasarnya. Misalnya saya mau mendesain keripik nangka saya dengan unsur tenun dari Ende. Maka nanti saya minta yang desain itu untuk memasukkan unsur desain tenun dari Ende untuk jadi *background*-nya. Jadi, inilah cara saya agar masyarakat tahu bahwa selain ada makanan lokal dari NTT, mereka juga tahu bahwa ada desain tenun khas NTT dalam kemasan produknya di situ. Tidak hanya dari Ende saja tapi saya masukkan juga desain tenun dari daerah lain. Itu cara saya mencintai tenunan dengan cara saya. Karena tidak mungkin saya memaksakan diri saya yang tidak memiliki keahlian menenun dan saya harus belajar tenun supaya orang bisa mengenalnya. Di samping itu, saya juga berkomitmen untuk memasukkan unsur kearifan lokal selain tenunan, juga bagaimana tenunan ini bisa mendukung produk-produk kerajinan lain.” (YU, FGD di Kota Kupang, 15 Juli 2017).

Narasi lain dikemukakan oleh HE. Meskipun HE bukan penenun, aktivitasnya bergabung dalam proses ekonomi kreatif kain tenun, ternyata membawa pada pemberdayaan dirinya.

“Saya mama HE, sudah bergabung dengan Jargub sejak 2002. Cerita teman-teman sudah menggambarkan bahwa awal mula kami mau keluar itu dari rumah itu sebuah langkah awal. Tahun demi tahun kami berjalan, dan berkat penguatan kapasitas oleh LSM, kemudian mengenalkan kami ke lembaga-lembaga lokal maupun tingkat nasional sampai dengan 2010. Dari 2010 sampai 2012 kami dipercaya

mengelola dana. Berjalan dan terus berjalan dan sampai sekarang kelompok kami tidak melalui Jargub. Jargub hanya merekomendasi ke Pemkab. Kalau untuk bicara tentang tenunan, bagi kami Jargub merupakan hal yang tidak asing. Sebenarnya, di NTT ini kurang lebih yang sempat kami tahu ada 39 jenis motif dan anggota Jargub itu sendiri sekitar 20 lebih. Itu kami tahu per suku. Misalnya suku Timor sendiri itu ada beberapa jenis. Yang menjadi hal bagi Jargub, ketika kami mau mempertahankan motif kami, muncullah motif tiruan. Tapi berkat kerja sama kami, kami membangun relasi dengan pemerintah, akhirnya bukan hanya Jargub, tapi kami bermitra dengan lembaga lain, akhirnya selain dari pemerintah kabupaten, di provinsi juga mengharuskan ada hari-hari kerja yang harus menggunakan tenun dan untuk Kabupaten Kupang, kalau ada pegawai yang ketahuan memakai tenun dengan motif tiruan itu akan dapat hukuman dan itu bisa dibilang menjadi kebanggaan, karena itu merupakan perjuangan kami. Jargub sebenarnya punya masalah pada akhirnya, karena bukan hanya kami bersaing secara pasar, tetapi kami juga berpikir keberlanjutan untuk mempertahankan tenun yang akan datang. Generasi kami sampai dengan kami saat ini, kebanyakan tidak tahu tenun itu seperti apa, mengerjakannya seperti apa. Nah, oleh sebab itu, kami punya pemikiran untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang, untuk bagaimana tenun itu dijadikan sebagai pelajaran muatan lokal. Dan kami anggota Jargub yang tahu tentang tenun, siap untuk memfasilitasi jadi guru. Tidak hanya tenunan, tetapi juga aksesoris. Orang Jargub punya kemampuan luar biasa untuk membuat tenun, membuat aksesoris, dan menjahit tas. Saya coba lihat di Kota Kupang itu hanya lima saja yang bukan anggotanya dan anggota Jarpuk yang menenun itu sampai dengan Naimata ada 54 orang. Dan mereka pernah dapat dukungan dari pemerintah pusat, itu berarti jika kita bicara tenun, kita membangun relasi dengan pemerintah dan LSM. Tidak hanya penguatan kapasitas, tetapi juga bisa berelasi dengan perbankan (HE, FGD di Kota Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui kisah YU dan HE, ternyata jaringan perempuan berperan besar dalam pemasaran kain tenun. Tidak hanya secara individu,

seperti dilakukan YU dan HE, tetapi juga kolektif melalui ibu-ibu pejabat PKK dari kabupaten dan provinsi. Dalam konteks ini terlihat bagaimana perempuan dari kelas sosial yang berbeda, yaitu kelas bawah (para penenun) dengan kelas menengah (ibu-ibu pejabat PKK) berinteraksi untuk membuat dan memasarkan kain tenun. Penelitian ini menemukan satu lagi peran penting PKK, di luar apa yang dikatakan oleh Soetjipto dan Adelina (2013) dalam mendorong pemberdayaan perempuan kelas bawah secara riil dengan berperan pada pemasaran dan promosi kain tenun.

F. Penutup

Apakah menenun memberikan ruang berkiprah lebih “luas” bagi perempuan penenun di Lombok Timur dan Kupang? Jawaban untuk pertanyaan ini bisa ya dan bisa juga tidak. Paparan tulisan ini menunjukkan bahwa kain tenun kini menghadapi tantangan dan ekspektasi yang berbeda dengan masa lalu. Dalam konteks MEA, kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan keinginan pemerintah daerah mempromosikan wisata, kain tenun menjadi salah satu komoditas penting ekonomi kreatif yang hendak dikembangkan.

Kain tenun dan menenun kini tidak sekadar bagian ritual menjaga tradisi. Namun, kini sudah meningkat menjadi komoditas dan aktivitas ekonomi kreatif. Melalui aktivitas menenun, para perempuan penenun ibu rumah tangga telah memiliki ruang sosial baru yang mungkin dahulu belum pernah mereka bayangkan. Dengan menenun perempuan dapat ke luar rumah, melakukan interaksi secara individu maupun kelompok, serta meningkatkan keterampilan ekonomi dan cakrawala pandang. Meskipun demikian, keinginan kedua pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Kupang untuk menjadikan menenun sebagai kegiatan utama menambah pendapatan keluarga, tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan karena sejauh ini menenun dilakukan sebagai kegiatan sampingan.

Jika dilihat lebih mendalam, perubahan dari menenun sebagai sebuah ritual penjaga tradisi ke menenun sebagai aktivitas ekonomi kreatif tidak serta merta memperbaiki relasi gender di dalam keluarga.

Perempuan masih tetap diberikan porsi dan tanggung jawab pada posisi-posisi domestik, seperti mengurus rumah tangga, menyiapkan makanan, dan menyiapkan berbagai kebutuhan anak-anak dan suami. Suami pada umumnya belum mau membantu menjalankan tugas tugas domestik istrinya. Meskipun dalam rantai proses menenun, laki-laki juga berperan misalnya dalam membeli benang dan memasarkannya. Namun, perempuan penenun dengan anak kecil tetap menghadapi kesulitan menjaga anak-anak mereka. Perempuan tetap dibebani pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan saat ini justru ditambahkan satu lagi beban untuk memberikan tambahan pendapatan untuk menopang ekonomi keluarga. Tanpa ada perbaikan relasi gender yang seimbang, justru perempuan yang menanggung beban “*triple*” dalam ekonomi kreatif kain tenun.

Menenun sebagai aktivitas ekonomi baru memang memberikan ruang gerak sosial dan harapan baru bagi para perempuan ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Namun, rendahnya harga jual kain tenun yang tidak sebanding dengan tenaga dan ongkos produksi menyebabkan perempuan penenun tetap terjebak pada lingkaran kemiskinan. Hasil penjualan kain tenun sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan suaminya. Menenun saat ini sebagai aktivitas ekonomi kreatif belum bisa disebut memberdayakan perempuan penenun.

Selain itu, tulisan ini menemukan pentingnya isu kelas sosial. Perempuan penenun yang rata-rata berasal dari kelas bawah biasanya mengalami kesulitan untuk memperbaiki relasi gender yang lebih adil. Mereka tidak cukup memperoleh pendapatan bagi peningkatan posisi tawarnya di dalam keluarga. Berbeda dengan perempuan kelas menengah yang rata-rata tidak terlibat dalam penenunan. Para perempuan yang berperan dalam proses pemasaran kain tenun biasanya berasal dari kelas menengah sehingga memiliki modal ekonomi yang lebih besar dan mudah menjalankan berbagai kegiatan dengan dukungan dari suaminya. Jadi, persoalan kelas ini menjadi salah satu isu yang muncul dan perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan perempuan penenun. Dalam konteks interaksi antara kelas sosial ini

pula, perempuan kelas menengah baik secara individu maupun kolektif melalui PKK ikut berperan dalam pemasaran kain tenun.

Menemukan isu kelas sosial antara para pelaku ekonomi kreatif kain tenun di dua daerah ini, penulis menilai pisau analisis “interseksionalitas” atau “*intersectionality*” yang diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw (1991) sebagaimana diulas juga oleh Lykke (2010) adalah lensa yang tepat untuk melihat dan menganalisis adanya kompleksitas situasi diskriminasi, eksploitasi, atau kekerasan yang dihadapi para perempuan itu, bersilangan dan bersinggungan dengan berbagai persoalan lain, seperti ekonomi, kelas sosial, etnisitas, dan maskulinitas kebijakan negara sehingga pisau analisis ‘interseksionalitas’ ini akan mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi perempuan tidak hanya melihat dari satu sebab saja, tetapi dilihat dari berbagai macam sisi dan kemungkinan solusi. Dalam konteks ekonomi kreatif kain tenun di dua daerah ini, misalnya: a) upaya dapat dilakukan untuk perbaikan keseimbangan relasi gender antara perempuan dan laki-laki (khususnya di keluarga penenun dari kelas sosial bawah), b) perbaikan relasi dan hubungan agar lebih saling mendorong satu sama lain terutama antara para perempuan penenun dari kelas sosial bawah dengan para perempuan kelas menengah yang umumnya berada pada proses pemasaran kain tenun, dan c) serta perbaikan kebijakan pemerintah daerah yang lebih ramah terhadap suara dan hak perempuan penenun, dan tidak semata berorientasi pada motif ekonomi.

Melalui berbagai ulasan di bab ini, tulisan ini menyimpulkan adanya narasi perempuan yang sama dalam ekonomi kreatif kain tenun di Lombok Timur dan di Kota Kupang, yaitu pertama, menenun masih menjadi kegiatan sampingan; kedua, bahwa perempuan justru menghadapi tantangan “*triple*” beban; ketiga, harapan akan memperoleh kesejahteraan dari penjualan kain tenun belum tercapai. Rendahnya harga jual kain tenun yang tidak sebanding dengan tenaga dan ongkos produksi menyebabkan perempuan penenun tetap terjebak pada lingkaran kemiskinan. Keempat, narasi serupa lainnya adalah persoalan perbedaan kesejahteraan antara perempuan penenun kelas bawah dengan perempuan kelas menengah yang memasarkannya; dan

kelima, adanya kehadiran jaringan perempuan secara individu maupun kolektif dalam pemasaran kain tenun secara positif.

Para pembuat kebijakan harus berhati-hati dalam merumuskan formula pengembangan ekonomi kreatif kain tenun maupun berbagai produk olahannya untuk ekonomi kreatif berorientasi produksi massal, agar tidak lebih dalam menjerumuskan perempuan ke dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Perempuan penenun dalam ekonomi kreatif jangan sampai hanya menjadi objek dan tidak ditempatkan sebagai subjek dalam rencana pengembangannya. Pemenuhan hak-hak dan sistem pendukung yang baik bagi perempuan penenun (misalnya standar uang yang layak dan sistem pendukung untuk pengasuhan anak-anak) menjadi standar wajib yang harus dipenuhi dalam pembuatan kebijakan terkait. Upaya apa pun yang dilakukan seyogianya selalu mempertimbangkan upaya menciptakan relasi gender yang lebih baik bagi perempuan dan memberdayakan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA



- Connell, R. W. (2008). *Gender: A short introduction*. Polity Press.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Dewi, K. H. (2015). *Indonesian women and local politics: Islam, gender and networks in post-Suharto Indonesia*. NUS Press, Kyoto University Press.
- Dewi, K. H. (2023). The city, PKK leaders, and women's empowerment. *Asian Journal of Women's Studies*, 29(1), 121–135. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/12259276.2023.2170047>
- Eisenstein, H. (1984). *Contemporary feminist thought*. Unwin Paperbacks.
- Harding, S. (1987). The method question. *Hypatia*, 2(30). <http://www.jstor.org/stable/3810120>.

- Lykke, N. (2010). *Feminist studies a guide to intersectional theory, methodology and writing*. Routledge.
- Saptari, R. (2000). Networks of reproduction among cigarette factory women in East Java. Dalam J. Koning, M. Nolten, J. Rodenburg, & R. Saptari (Ed.), *Women and households in Indonesia: Cultural notions and social practices*. Routledge.
- Soetjipto, A. W., & Adelina, S. (2013). *Suara dari desa: Menuju revitalisasi PKK*. Marjin Kiri.